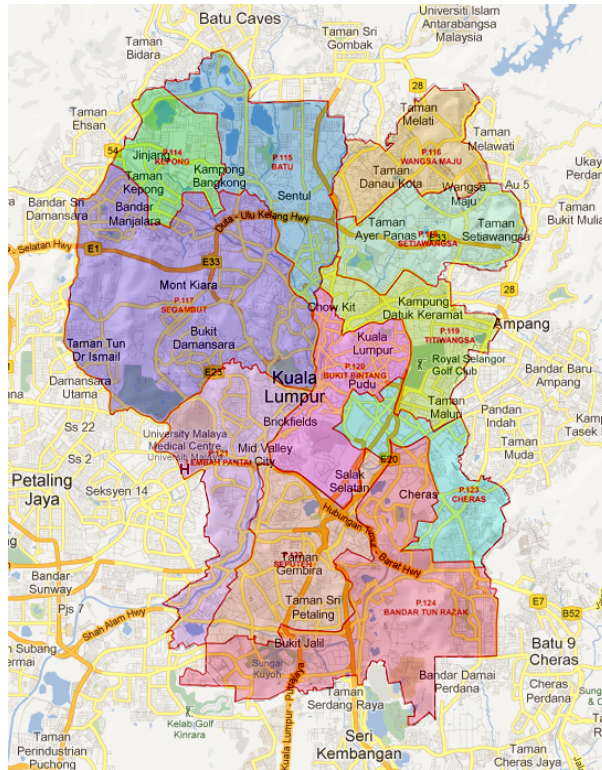


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kuala Lumpur



Gambar 2. 1 Peta Kota Kuala Lumpur

Malaysia merupakan sebuah negara federal yang mencakup tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dan terdiri dari dua wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia yang berada di daratan Asia dan Malaysia Timur yang berada di bagian utara pulau Kalimantan. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat berjalannya pemerintahan. Malaysia dikenal dengan keragaman budaya dan etnisnya, yang mencakup Melayu, Tionghoa, India, dan banyak kelompok etnis

pribumi lainnya. Agama Islam adalah agama resmi, namun konstitusi negara ini menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya.

Malaysia merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling maju di Asia Tenggara. Negara ini memiliki ekonomi yang beragam dari sektor manufaktur, jasa, pertanian, dan pertambangan. Malaysia juga terkenal sebagai produsen utama minyak sawit dan karet dunia. Dalam bidang pariwisata, Malaysia menawarkan berbagai atraksi mulai dari menara kembar Petronas di Kuala Lumpur, pantai-pantai indah di Langkawi dan Pulau Tioman, hingga hutan hujan tropis di Sabah dan Sarawak yang kaya akan keanekaragaman hayati. Infrastruktur yang baik dan kebijakan yang ramah investasi juga menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan favorit bagi investor asing.

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, atau yang dikenal dengan Kuala Lumpur, merupakan ibu kota dan kota terbesar di Malaysia. Kuala Lumpur memiliki jumlah penduduk sebesar 5,7 juta jiwa. Kawasan Wilayah Persekutuan mencakup wilayah seluas 244 km² dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa per tahun 2010. Letak Kuala Lumpur berciri lembah besar yang dikenal sebagai Lembah Klang yang berbatasan dengan Pegunungan Titiwangsa di timur, beberapa pegunungan kecil di utara dan selatan, dan Selat Malaka di barat. Kuala Lumpur terletak di muara antara Sungai Klang dan Gombak.

Terletak di tengah-tengah negara bagian Selangor, Kuala Lumpur pernah berada di bawah pemerintahan Selangor. Pada tahun 1974, Kuala Lumpur dipisah untuk membentuk Wilayah Persekutuan pertama yang diatur secara langsung oleh Pemerintah Federasi Malaysia. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah salah satu

dari tiga buah Wilayah Persekutuan Malaysia, dan juga sebuah enklaf di dalam wilayah negara bagian Selangor, di pantai barat tengah Semenanjung Malaysia. Sejak tahun 1990-an, kota ini telah menjadi tuan rumah dari berbagai acara olahraga, politik, dan kebudayaan internasional, seperti Commonwealth Games 1998 dan Formula Satu. Selain itu, di Kuala Lumpur berdiri gedung kembar tertinggi di dunia, yaitu Menara Kembar Petronas.

Kuala Lumpur, selain menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi Malaysia sebagai ibu kota dan kota utama, juga memiliki beberapa institusi penting negara. Parlemen Malaysia, misalnya, terletak di kota ini. Meskipun pada tahun 1999 kantor pemerintahan eksekutif dan kehakiman dipindahkan ke Putrajaya, Kuala Lumpur masih menjadi rumah bagi beberapa kantor cabang kehakiman. Selain itu, sebagai kediaman resmi Yang di-Pertuan Agong, Istana Negara terletak di Kuala Lumpur. Hal ini menunjukkan peran kota Kuala Lumpur sebagai pusat administratif dan politik yang penting dalam struktur pemerintahan Malaysia.

Tugas pemerintahan kota menjadi tanggung jawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan umum, pembuangan dan pengelolaan sampah dan limbah, perencanaan kota, perlindungan lingkungan, pengawasan konstruksi, pembangunan sosial dan ekonomi, dan pemeliharaan prasarana kota secara umum. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Datuk Bandar yang dilantik dengan masa jabatan tiga tahun oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Sistem pelantikan datuk bandar ini berlaku sejak pemilu pemerintah setempat ditunda pada tahun 1970.

Kuala Lumpur merupakan wilayah metropolitan dan menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya dengan pertumbuhan paling pesat di Malaysia. Walaupun kantor pemerintahan pindah ke Putrajaya, kota ini tetap menjadi pusat ekonomi, keuangan, bisnis, asuransi, properti, media, dan kesenian negara. Keberadaan infrastruktur yang maju, termasuk bandara internasional dan jaringan transportasi yang baik, menjadikan Kuala Lumpur sebagai magnet bagi investasi dan pusat pertemuan bisnis internasional. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis di Kuala Lumpur memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi nasional Malaysia secara keseluruhan. Sektor pariwisata juga berperan penting dalam ekonomi Kuala Lumpur. Beberapa atraksi pariwisata terkenal termasuk Menara Kembar Petronas, taman burung Kuala Lumpur, Jalan Alor, Lapangan Merdeka, Aquaria KLCC, Batu Caves, Jalan Petaling, Kebun Binatang Negara, serta tujuan wisata lainnya. Selain itu, Kuala Lumpur menjadi pusat diselenggarakannya acara-acara kebudayaan Melayu, perayaan kebudayaan Cina di Tokong Thean Hou, dan perarakan Thaipusam di Kuil Sri Maha Mariamman.

Etnis Melayu mendominasi menjadi etnis mayoritas di Malaysia dan menjadi kelompok terbesar di Kuala Lumpur dengan kekayaan warisan budaya yang menjadi inti identitas nasional. Etnis kedua terbesar merupakan etnis Cina yang memberikan kontribusi besar dalam bidang perdagangan, bisnis, dan industri, serta kekhasan budaya mereka yang dapat ditemui di sudut-sudut kota. Kuala Lumpur juga dihuni oleh etnis India, Serani, dan juga suku-suku Kadazan, Iban dan suku asli lain dari Malaysia Timur dan Barat. Dari jalan-jalan yang sibuk hingga pasar-pasar

tradisional, keberagaman etnis ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Kuala Lumpur, menciptakan kota yang dinamis dan beraneka ragam.

Di Kuala Lumpur, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Namun, berbagai bahasa lain juga umum digunakan karena ragamnya budaya dan banyaknya lingkup komunitas etnis yang berbeda. Bahasa lain yang umum digunakan adalah bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, Hokkien, Canton, Iban, serta Kadazan. Keragaman bahasa ini mencerminkan keragaman budaya yang ada di Kuala Lumpur. Banyak penduduk lokal di Kuala Lumpur menguasai lebih dari satu bahasa, bahkan hingga tiga bahasa, karena mereka memerlukannya dalam berkomunikasi sehari-hari dengan sesama.

2.2 Warga Negara Indonesia di Kuala Lumpur

Malaysia menjadi salah satu destinasi internasional yang paling dekat dengan Indonesia dan memiliki aksesibilitas yang baik melalui berbagai jalur transportasi. Secara geografis, Malaysia terletak dekat dengan perbatasan Indonesia terutama dengan pulau Sumatra di sebelah barat dan Kalimantan di sebelah timur sehingga memungkinkan perjalanan yang cepat dan aksesibilitas yang mudah baik melalui jalur udara dan juga jalur darat.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan yang pesat di Asia Tenggara, Kuala Lumpur termasuk dalam pilihan destinasi yang paling diminati WNI untuk tinggal atau bekerja. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menciptakan banyak peluang kerja di berbagai sektor industri seperti konstruksi, manufaktur, teknologi, keuangan, pariwisata, dan layanan profesional lainnya. Tingkat gaji yang kompetitif yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia menjadi daya tarik tambahan bagi para pencari

kerja. Kuala Lumpur juga menawarkan kualitas hidup yang tinggi bagi pekerja migran dengan kemajuan infrastruktur kota, sistem transportasi publik yang efisien, layanan kesehatan berkualitas, serta gaya hidup perkotaan yang dinamis. Lingkungan yang kondusif untuk kewirausahaan dan inovasi juga menjadikan Kuala Lumpur sebagai sarana yang menarik bagi pengusaha yang ingin memulai atau mengekspansi bisnis mereka.

Selain faktor ekonomi dan kemudahan akses, pekerja dari Indonesia merasa nyaman bekerja di Kuala Lumpur karena besarnya komunitas WNI dan aktif di sana. Kuala Lumpur bahkan memiliki kawasan populer yang disebut 'Mini Jakarta', yaitu kawasan Chow Kit. Meski wilayah ini tidak sebesar Jakarta, namun 75 persen penduduk kawasan Chow Kit merupakan WNI atau keturunan WNI. Komunitas WNI sering kali menyediakan dukungan sosial dan budaya serta aktif menyebarkan berbagai informasi mengenai WNI di berbagai pelosok Malaysia. Salah satu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia di Malaysia adalah Persatuan Masyarakat Indonesia (Permai). Organisasi ini turut mengadakan kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya, serta mendukung pembangunan sekolah-sekolah dan organisasi Indonesia. hal ini semakin memperkuat daya tarik Kuala Lumpur sebagai tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia.

Dengan segala peluang, faktor, serta sumber daya yang ditawarkan oleh kota Kuala Lumpur, kota ini menjadi destinasi yang paling diminati oleh WNI. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, gaji yang lebih tinggi, pertumbuhan infrastruktur kota yang maju, serta besarnya komunitas Indonesia berkontribusi dalam tingginya minat WNI untuk tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur. Fenomena ini dapat dilihat dengan jumlah yang

signifikan dari WNI yang menetap di Kuala Lumpur, menjadikan Malaysia menjadi negara dengan populasi WNI terbanyak di luar negeri.

2.3 Pemilu 2024 di Luar Negeri

Momentum Pemilu menjadi kesempatan penting bagi persatuan bangsa karena Pemilu menentukan arah masa depan negara selama lima tahun ke depan. Warga Indonesia diberikan hak yang luas untuk memilih sesuai dengan keyakinan mereka dengan turut menghormati perbedaan dan memprioritaskan persatuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemilu di luar negeri menjadi bukti perwujudan WNI untuk dapat menggunakan hak pilih mereka terlepas dari di mana mereka tinggal. Kedaulatan rakyat tidak terbatas pada batas-batas geografis, tetapi meluas ke seluruh dunia di mana pun warga Indonesia berada. Dengan memberikan hak suara kepada warga di luar negeri, Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan arah politik dalam negeri, namun juga memperkuat ikatan antara WNI dengan tanah air mereka.

Partisipasi dalam pemilihan merupakan salah satu cara yang signifikan bagi warga negara untuk ikut serta dalam sistem demokrasi dan menyuarakan suara dalam menentukan tujuan masa depan negara. Pada dasarnya, setiap individu berhak untuk berpartisipasi politik secara aktif untuk memperngaruhi perkembangan politik negara. Dengan memanfaatkan hak pilih di luar negeri, WNI menunjukkan rasa tanggung jawab mereka terhadap negara serta kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan dan kepemimpinan. Keterlibatan ini juga menunjukkan bahwa setiap WNI tetap dapat terhubung dengan politik dan isu-isu domestik di Indonesia, meskipun berada di luar negeri. Pemilu di luar negeri diorganisir oleh KPU melalui PPLN. Pemilu diselenggarakan melalui tiga metode. Pertama, pemungutan suara

dilakukan di Tempat Pemungutan Suara di Luar Negeri (TPSLN) dengan datang ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Indonesia di negara masing-masing. Metode kedua adalah KSK, dimana petugas Pemilu membawa kotak suara ke lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. KSK dilaksanakan bagi WNI yang berada jauh dari pusat kota dapat memberikan surat suara mereka dengan mudah tanpa harus pergi ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Indonesia. Metode ketiga adalah metode pos. Dalam metode ini, WNI menerima surat suara melalui pos dan mengembalikannya dengan cara yang ditentukan ke kantor pemilihan yang sudah ditetapkan. Metode ini memungkinkan mereka yang tidak bisa hadir secara langsung ke TPSLN ataupun KSK.

Pemungutan suara di TPSLN pada Pemilu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serentak 2024 di luar negeri dilaksanakan pada 5,6,8,9,10,11,13, dan 14 Februari 2024 sesuai dengan Keputusan KPU No.1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN 2024. Pemilu di luar negeri dilaksanakan lebih awal dari Pemilu dalam negeri dengan jadwal yang berbeda di setiap kota. Pada Pemilu ini, jumlah pemilih yang berada di luar negeri yang tercatat dalam DPT mencapai 1.750.474 orang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dilaksanakan sebelum Pemilu di dalam negeri, namun proses penghitungan dan rekapitulasi suara tetap dilakukan secara bersamaan.

Mekanisme WNI dalam memilih atau mencoblos juga diatur dalam Pasal 353 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal tersebut, pemilih memberikan suara dengan cara memasukkan satu tanda pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau logo partai politik yang mencalonkan dalam satu kotak yang tersedia pada surat suara untuk pemilihan presiden

dan wakil presiden. KPU juga mengatur ketentuan pemilih yang tidak dapat hadir di hari pemungutan suara. Menurut aturan tersebut, mereka tidak diizinkan untuk menunjuk orang lain untuk mewakili dalam memberikan suara. KPU juga menyediakan solusi bagi masyarakat yang tidak dapat mencoblos sesuai lokasi DPT mereka, yaitu dengan menyediakan layanan pindah pemilih. Dengan demikian, hak suara setiap warga negara tetap terjamin, memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung secara adil, merata dan demokratis.

2.4 Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur sudah dimulai sejak awal 2023. PPPLN Kuala Lumpur bersama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) bekerja keras untuk memastikan seluruh proses Pemilu berjalan lancar dan transparan. Persiapan ini mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu, pengadaan logistik seperti kotak suara dan surat suara, serta penyusunan DPT. Lembaga pengamat Pemilu seperti Perludem dan Migrant Care menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, pertemuan komunitas, dan melalui organisasi-organisasi masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur. Hal ini penting mengingat banyak WNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia mungkin tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai prosedur Pemilu.

Logistik Pemilu 2024 yang dikirim oleh KPU untuk PPLN Kuala Lumpur telah diterima oleh PPLN Kuala Lumpur pada 21-23 Desember 2023 dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kuala Lumpur (Panwaslu KL). Logistik yang diterima berupa bilik suara, kotak suara, sampul surat suara untuk metode pos, bolpen,

alat mencoblos, gembok, surat suara, tinta, serta segel yang disimpan di KBRI Kuala Lumpur. Logistik yang tiba telah disortir dan dicek ulang untuk memastikan bahwa tidak ada yang rusak dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah disortir, terdapat 452.065 (99,8 persen) surat suara DPR RI 451.692 (99,7 persen) surat suara Presiden-Wakil Presiden yang bagus dan dapat digunakan. Sementara itu, kekurangan surat suara yang terdeteksi langsung dilaporkan ke KPU sehingga pengiriman suara tambahan dapat segera dilakukan.

Pemilu di Kuala Lumpur dengan metode TPSLN dilaksanakan pada 11 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1811 tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR Serentak Tahun 2024 di Luar Negeri yang dirilis oleh KPU. Sementara itu, untuk mempermudah akses bagi WNI yang tinggal jauh dari pusat kota, PPLN juga menyediakan layanan KSK yang mendatangi komunitas-komunitas WNI di berbagai wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Total KSK berjumlah 136 yang disebarluaskan dalam wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur yang meliputi Wilayah Persekutuan Putrajaya, Selangor, Terengganu, Perak dan Kelantan. Pelaksanaan metode KSK berlangsung sebelum hari pemungutan suara di TPSLN, yaitu dari 4-10 Februari 2024. Juru bicara PPLN Kuala Lumpur, Puji Sumarsos, menyampaikan bahwa lokasi yang dipilih di hari pertama pemungutan suara metode KSK disesuaikan dengan kesiediaan dan kesiapan tuan rumah yang menyiapkan lokasi. Selain metode TPS dan KSK, metode pos dilaksanakan dari 2 Januari hingga 15 Februari 2024. Metode pos ini memungkinkan WNI yang tidak dapat datang langsung ke TPS untuk tetap memberikan suaranya dengan mengirimkan surat suara melalui pos yang dikirim ke

alamat pemilih melalui Pos Malaysia dengan layanan Pos Laju. Penggunaan layanan Pos Laju bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kecurangan karena PPLN Kuala Lumpur dapat melakukan tracking terhadap surat suara yang dikirim.

Pemilu 2024 di Kuala Lumpur melibatkan berbagai persiapan dan pelaksanaan yang kompleks, mengingat adanya sistem hukum yang berbeda di luar negeri. Pemilu di Kuala Lumpur diawasi oleh Panwaslu KL untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain Panwaslu, Kepolisian Diraja Malaysia juga turut mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara. Kerjasama dengan pihak kepolisian setempat menjadi kunci dalam mendukung berjalannya Pemilu yang aman bagi pemilih.